

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERUSAHAAN SWASTA (Studi Kasus Putusan No. 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG)



Oleh

VERA LINDA BR SITEPU

B 111 10 477

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM PERUSAHAAN SWASTA**
(Studi Kasus Putusan No. 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG)

OLEH :

VERA LINDA BR SITEPU

B 111 10 477

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERKAIT BUDAYA HUKUM MASYARAKAT SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN GOWA

(Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD IKRAM NUR FUADY

NIM B 111 10 904

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada (Hari / Tanggal /Bulan/ Tahun)
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.
NIP. 19531124197912 1 001

Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 19660320 199103 1 005

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

N a m a : VERA LINDA BR SITEPU
Nomor Induk : B 111 10 477
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Penggelapan
dalam Perusahaan Swasta (Putusan No.
156/Pid.B/2013/PN.SUGG)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 4 Mei 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H
NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Amir Ilyas. S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 100 1

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

N a m a : VERA LINDA BR SITEPU

Nomor Induk : B 111 10 477

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Penggelapan
dalam Perusahaan Swasta (Putusan No.
156/Pid.B/2013/PN.SUGG)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2014

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP 19630419 198903 003

ABSTRAK

VERA LINDA (B111 10 477), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Penggelapan dalam Perusahaan Swasta (Studi Kasus Putusan No. 156/Pid.B/2013/PN.SUGG)”’. Dibawah bimbingan Bapak Andi Sofyan selaku pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta pada perkara No. 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini yakni Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1). Penerapan hukum pidana oleh hakim pada perkara Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 374 KUHP tentang penggelapan telah terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta. 2). Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sampai saat ini sehingga penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perusahaan Swasta (Studi Kasus Putusan No.156/Pid.B/2013/PN.SUNGG) dapat diselesaikan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada ibunda tercinta **Sempa Arih Br Sembiring** yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik Penulis, dan doanya yang selalu menyertai agar tidak salah dalam mengambil langkah dan bisa menjadi orang yang sukses. Juga kepada ayahanda tercinta **Dem Sitepu** yang selalu mendukung dan memberikan motivasi di setiap perjalanan pendidikan yang ditempuh, Juga kepada kakak tersayang Fretty Florentina Br Sitepu dan abang tersayang Teddy Saputra Sitepu yang telah memberikan banyak sumbangsih dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan

skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata, Penulis ingin menyampaikan rada terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi Sp. Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H. DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng selaku PD I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H selaku PD II, dan kepada bapak Romi Librayanto, S.H., M.Hum selaku PD III.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Ilyas. S.H., M.H, selaku pembimbing II yang mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, juga kepada Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H, Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.Si, dan juga kepada Ibu Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H, selaku tim Penguji Penulis yang telah memberikan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr., Muhammad Yunus, S.H., M.Si, selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi.
5. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Staf Pengadilan Negeri Sungguminasa yang membantu Penulis selama masa penelitian.
7. Kepada keluarga besar Perbakin Unhas khususnya Diksar XXI yang saya sayangi.
8. Kepada sahabat-sahabatku tersayang “Hele-Hele”, Nur Aisyah Bachri, S.H Wajdawati, S.H, Hamsiati Hasim, S.H, Yenni Widyastuti, S.H, Fatthiya Rizza Amalia, , Kattya Nusantara Putri, S.H, Novi Arniansyah, Siti Dwi Marwayanti, terima kasih untuk

setiap bantuan, motivasi dan kenangan yang kalian berikan selama Penulis di Makassar.

9. Kepada Bapak dan Ibu Desa Maliwowo dan keluarga, yang menerima penulis sebagai keluarga selama KKN Gelombang 85 di Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.
10. Teman-teman Posko KKN Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur Punyu, Ahsan, Heri, dan , dan semua teman-teman KKN se-Kecamatan Angkona.
11. Untuk Andi Reza, kak Hana Sabarina, kak Rista, kak Rani, kak Lisa Siburian, kak Novita Ginting, adek Trie Hariyani, abang Dika, dan abang ea, abang Jasmin Sitorus, abang Darwin Siagian yang membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman SMA Penulis yaitu Yunita, Octry Sari Helena, Reny Amanda, Fika Rani, Terimakasih atas dukungan dan kebaikan kalian.
13. Untuk semua keluarga besar Penulis yang ada di Kabanjahe, terimakasih untuk cinta dan kasing kalian semua.
Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis

dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kedepannya Penulis bisa lebih baik lagi.

Tuhan Memberkati

Makassar, Juni 2014

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Pengertian Tindak Pidana Jabatan	11
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Penggelapan	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	19
3. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan	25
C. Perseroan Terbatas (PT).....	35
1. Perseroan Terbatas Menurut UU.....	35
2. Pengertian Perseroan Terbatas	35
3. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas	36
4. Tugas dan Tanggungjawab Direksi.....	38
D. Pidana dan Pemidanaan	43
1. Tujuan Pemidanaan.....	43
2. Pengertian Pemidanaan	48
3. Jenis-jenis Pemidanaan	50
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	54
B. Jenis dan Sumber Data.....	54
C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perusahaan Swasta berdasarkan Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUGG	
1. Posisi Kasus	56
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	57
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	61
4. Amar Putusan.....	62
5. Analisis Penulis.....	62
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUGG	
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUGG.....	65
2. Analisis Penulis.....	70

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	75
2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi di berbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan jaman, membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis. Semakin meningkatnya proses modernisasi dengan ditemukannya alat-alat transportasi dan komunikasi, menuntut norma dan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan nasional dan internasional. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan terutama kecanggihan komunikasi, informasi, dan transportasi menjadikan bumi ini terasa sangat kecil, dimana suatu kejadian di salah satu tempat di bumi dapat diakses dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dapat diketahui di belahan bumi lainnya.

Namun dengan perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dipungkiri.

Setiap pencapaian kemajuan di bidang ipteks dan ekonomi baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, selalu diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial. Hal ini dikarenakan kemajuan dari ekonomi ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali tidak sejalan dengan semangat kemanusiaan yang berakibat timbulnya faktor-faktor negatif yang merupakan perwujudan dari tindak pidana yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, keamanan terhadap masyarakat ataupun terhadap negara. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan.

Masalah tindak pidana nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahnya. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian yang diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang terpadu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana dianggap sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Dalam Ilmu Hukum Pidana dinyatakan, bahwa menurut wujud dan sifatnya tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum, di mana hukum yang mengatur perbuatan dimaksud harus dibentuk atau diadakan terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Asas Legalitas (*Principles of Legality*) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang menyatakan sebagai berikut, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Dari berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat, dimana salah satunya adalah kejahatan penggelapan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.

Menurut Clairen, inti tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.¹

Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 – Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).²

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 377 KUHP.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang diangkat penulis adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan oleh terdakwa dalam hal ini Adi Saputra Majid dalam kedudukannya sebagai Kepala Cabang PT. Niaga Abadi Subur Parigi Mountong yang bekerja pada Kantor PT. Niaga Abadi Subur, yang diberi tugas untuk menerima pembayaran dari nasabah dan menerima permohonan peminjaman atau *repeat order* pengajuan

¹ Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 107.

² Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 1.

peminjaman dari nasabah yang akan diteruskan ke PT. Niaga Abadi Subur dan untuk itu terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan. Atas kepercayaan dan tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepada terdakwa maka terdakwa telah meneruskan permohonan pinjaman atas nama nasabah Lily Tanjaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke kantor pusat PT. Niaga Abadi Subur yang kemudian disetujui oleh korban yang nilainya sesuai dengan pengajuan nasabah yang dikurangi dengan sisa angsuran pinjaman sebelumnya ditambah dengan angsuran pertama. Oleh karena telah disetujui korban maka pada tanggal 10 Februari 2011 PT. Niaga Abadi Subur mengeluarkan dana yang kemudian ditransfer ke rekening milik terdakwa. Dana tersebut seharusnya disalurkan/diberikan seluruhnya kepada nasabah Lily Tanjaya, akan tetapi terdakwa tidak menyalurkan/memberikan dana tersebut kepada nasabah Lily tanjaya dan selain itu juga terdakwa telah menerima pembayaran dari nasabah Lily tanjaya yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin atau sepengetahuan korban.

Dana yang ditransfer ke rekening milik terdakwa yang seharusnya disalurkan/diberikan seluruhnya kepada nasabah, telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya meskipun tanpa seizin atau sepengetahuan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perusahaan Swasta (Studi Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta berdasarkan Putusan Nomor : 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta berdasarkan Putusan Nomor : 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta berdasarkan Putusan Nomor : 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta berdasarkan Putusan Nomor : 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangsih yang ditujukan kepada para pembaca untuk semakin memahami pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan tentang penggelapan dalam perusahaan swasta pada khususnya.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta di masa yang akan datang sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara akan lebih sempurna dan lebih mencerminkan kepastian hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)³.

Para ahli hukum pidana Indonesia, memberikan pengertian yang berbeda-beda dalam memberikan pengertian istilah *strafbaar feit*. Hal ini disebabkan karena perbedaan sudut pandang antara satu dengan yang lainnya dan karena istilah *strafbaar feit* yang diterjemahkan dari *Werboek Van Strafrecht (W. v.S)* ke dalam bahasa Indonesia belum diberikan suatu penjelasan resmi mengenai arti dari *strafbaar feit* tersebut.

Menurut Muljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

⁴ Made Widnyana, 2010, *Pengantar Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 34.

3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Adami Chazawi menguraikan beberapa pengertian dari *strafbaar feit* dari para ahli yaitu:

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵

Para ahli ini dalam merumuskan pandangannya tentang definisi dari *strafbaar feit* menggunakan atau menampakkan pemisahan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan dualisme.⁶

Amir Ilyas juga menguraikan beberapa pengertian dari *strafbaar feit* dari para ahli, yaitu :⁷

- Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipertanggungjawabkan.”
- Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, hlm. 72.

⁶ *Ibid.*

⁷ Amir Ilyas. *Op. Cit*, hlm. 20.

- Pompe merumuskan *strafbaar feit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁸

Perbedaan pendapat mengenai pengertian *strafbaar feit* oleh ahli hukum pidana Indonesia, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

2. Pengertian Tindak Pidana Jabatan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.

Sebagian dari tindak pidana tersebut, oleh pembentuk undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai kejahatan jabatan atau *ambtsmisdrijven* dan sebagian lainnya telah diberikan kualifikasi sebagai pelanggaran jabatan atau sebagai *ambtsovertredingen*.

⁸ *Ibid.*

Maksud dengan kejahatan jabatan di atas, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP, sedangkan yang dimaksudkan dengan pelanggaran jabatan telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam Buku ke- VIII KUHP.⁹

Mengenai jenis pidana mana yang dapat dipandang sebagai tindak pidana jabatan ternyata tidak selalu sama, baik ditinjau menurut waktu maupun menurut tempat.

Menurut ketentuan Pasal 324 *Crimineel Wetboek*, pegawai negeri yang di dalam melaksanakan tugas jabatan mereka ternyata telah melakukan kejahatan yang tidak diatur dalam Bab ke-XXII akan dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang dapat dijatuhkan bagi orang-orang lain karena melakukan kejahatan yang sama.¹⁰

Walaupun tidak sepenuhnya sama, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 324 *Crimineel Wetboek* mengingatkan pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP yang mengatakan bahwa jika seseorang pegawai negeri karena tindak pidana yang ia lakukan telah menodai suatu kewajiban jabatannya yang bersifat khusus atau telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau saran yang ia peroleh karena jabatannya, maka pidananya dapat diperberat dengan sepertiga.¹¹

⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

¹¹ *Ibid*, hlm. 3.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu: (1) dari sudut teoritis, dan (2) dari sudut undang-undang. Pengertian dari teoritis adalah berdasarkan pendapat dari para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya. Sedangkan, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;

- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. “Maksud dari unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.¹²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan tersebut adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹² PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.184.

3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹³

Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi

¹³ Leden Marpaung, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Bandung, hlm. 10.

rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Perbedaan yang pokok antara kedua pendapat tersebut di atas, adalah:

1) Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis). Seperti:

- Pasal 48 KUHP (daya paksa/*overmacht*);
- Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/*noodweer*);
- Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang);
- Pasal 51 KUHP ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah);

Sedangkan pendapat materil, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain dari pada yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

- 2) Menurut pendapat yang formil, sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang materil sifat melawan hukum adalah unsur yang mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan dengan jelas.¹⁴

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari Jerman. Dalam hukum Jerman lama, orang membuat perbedaan antara yang disebut pencurian seperti yang kita kenal dengan yang disebut menguasai secara tidak sah. Selanjutnya dibuat lagi perbedaan berdasarkan kenyataan, yakni apakah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya.¹⁵

Dalam pengertiannya seperti itulah, orang Jerman kemudian telah memasukkan ke dalam undang-undang mereka apa yang disebut *Unterslagung* atau *verduistering* atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian.

¹⁴ Amir Ilyas. *Op. Cit*, hlm. 54.

¹⁵ Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit*, hlm. 111.

Apa yang dilakukan oleh orang Jerman di atas ternyata telah diikuti oleh para pembentuk *Wetboek van Strafrecht* di Negeri Belanda dengan mencantumkan yang disebut *verduistering* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka, dan diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrech*.¹⁶

Tindak pidana *verduistering* yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht*, yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Rumusan ini disebut atau diberi kualifikasi penggelapan. Perkataan *verduistering* diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

M.Sudrajat memberikan pengertian bahwa penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus ada dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁷ M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP*, Remaja Karya, Bandung, hal. 74.

Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.¹⁸

Sebagai contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu. Perbuatan tersebut lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana yang tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberikan kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.¹⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif, yang meliputi :

a. Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)

Tongat pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan: Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 70.

merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai.²⁰

Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.²¹

b. Unsur sesuatu barang.

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu.

²⁰ Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, hal. 59.

²¹ *Ibid.*

Hal yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.²²

c. Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain.

Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

d. Unsur barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Selanjutnya unsur “barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur pokok didalam tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.

²² Adami Chazawi, *Op.cit.* hal. 77.

Kata-kata yang berada dalam kekuasaannya itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Orang tidak dapat mengatakan tentang adanya hubungan semacam itu antara pelaku dengan benda-benda yang berada di dalam peti yang terkunci.

Perbuatan menguasai secara melawan hukum setelah sebelumnya harus membuka peti tersebut dengan paksa itu bukan merupakan suatu penggelapan melainkan suatu pencurian.²³

Sudah beradanya suatu benda dalam penguasaan pelaku secara nyata pada waktu pelaku menguasai benda tersebut secara melawan hukum itu merupakan ciri yang utama dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang membedakan tindak pidana tersebut dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu karena dalam tindak pidana pencurian itu, pada saat pelaku melakukan perbuatan mengambil, benda yang diambil itu harus masih berada dalam penguasaan pemiliknya.²⁴

e. Unsur secara melawan hukum.

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum.

²³ Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit*, hlm. 130.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 132.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya.²⁵

Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

2. Unsur subjektif yaitu,

Dengan Sengaja atau *opzettelijk*

Unsur sengaja atau *opzettelijk* merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelaku.²⁶

Karena unsur dengan sengaja atau *opzettelijk* merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dengan unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.²⁷

²⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.* hal. 80.

²⁶ Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit*, hlm. 113.

²⁷ *Ibid.*

Adami Chazawi, mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :²⁸

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.²⁹

²⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.* hal. 83.

²⁹ *Ibid.*

3. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:

a. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok

Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana diuraikan di atas, jika dirinci maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur-unsur subjektif, adalah:

- Dengan sengaja (*opzettelijk*).

2) Unsur-unsur objektif, adalah :

- Perbuatan memiliki;
- Suatu benda/barang;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Benda berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
- Menguasai secara melawan hukum.

b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan

Dikatakan tindak pidana penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan hewan atau benda itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim.

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Pasal 373 KUHP menentukan bahwa: "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan bukan hewan dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah:

- 1) Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.
- 2) Unsur-unsur yang meringankan, yaitu:
 - Bukan merupakan ternak
 - Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

c. Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan

1. Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yaitu tindak pidana dengan unsur-unsur memberatkan.

Pasal 374 KUHP mengatakan bahwa:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Unsur-unsur yang memberat sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah:

Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaannya disebabkan oleh :

- Karena ada hubungan kerja.
- Karena mata pencaharian atau pekerjaannya.
- Karena mendapatkan upah untuk itu.

Menurut *Hoge Raad*, yang dimaksud dengan hubungan kerja pribadi adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja.³⁰

³⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 134.

Dalam yurisprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus suatu perseroan terbatas, walaupun pengangkatan mereka itu ternyata tidak sah menurut *Burgerlijk Wetboek*, ataupun seorang direktur perseroan terbatas, walaupun ia dapat menduga bahwa pengangkatannya sebagai direktur itu sebenarnya tidak sah.³¹

Kata-kata *persoonlijke dienstbetrekking* yang diartikan sebagai hubungan kerja pada umumnya, sudah tentu memberi arti yang tidak benar, karena hubungan kerja dapat saja timbul karena adanya ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan tertentu.³²

Dalam Pasal 374 KUHP bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan, dimana yang disebut penggelapan jabatan sendiri oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 415 KUHP, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi yang tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai orang untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan.³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* hal. 135.

³³ *Ibid.* Hal. 136.

Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung, yakni putusan kasasi tanggal 8 Mei 1957 No. 83 K/Kr/1956, Mahkamah Agung RI antara lain telah memutuskan sebagai berikut: “Pengertian perkataan memiliki (*toeeigenen*) sebagai termaksud di dalam Pasal 374 KUHP ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut, maka penggunaan uang oleh seorang pegawai negeri untuk keperluan lain (meskipun untuk itu dibuat bon) daripada yang telah ditentukan, merupakan kejahatan termasuk dalam Pasal 374 KUHP”.³⁴

Dari putusan kasasinya di atas, orang dapat mengetahui bahwa Mahkamah Agung RI telah mengertikan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagai tindak pidana penggelapan jabatan.

Hal ini berarti pernah terjadi seorang pegawai negeri yang telah melakukan suatu penggelapan di dalam jabatannya, yang seharusnya membuat pegawai negeri tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 415 KUHP, tetapi telah dipidana karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP.

Mengenai benda mana yang dapat disebut sebagai benda yang ada pada pelaku karena mendapat imbalan uang atau *tegen geldelijke vergoeding*, Prof. Satochid Kartanegara telah memberikan contoh

³⁴ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan pertama, hlm 159.

yakni sepeda motor yang dititipkan pada seorang penjaga motor. Mengenai benda mana yang dapat disebut sebagai benda yang ada pada pelaku karena pekerjaannya, contohnya adalah uang perusahaan yang berada dalam penguasaan seorang juru bayar, sedangkan mengenai benda mana yang dapat disebut sebagai benda yang ada pada pelaku karena hubungan kerja pribadi, contohnya adalah uang belanja yang berada di tangan seorang pembantu rumah tangga, yang oleh majikannya telah disuruh berbelanja ke pasar.³⁵

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal diatas, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu.

Seharusnya dengan kepercayaan yang diberikan, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.³⁶

2. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHP.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wali dan lain-lainnya oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam

Pasal 375 KUHP yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang

³⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal 86.

³⁶ *Ibid*.

sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP juga merupakan suatu *gequليفةerde verduistering* atau suatu penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, yaitu karena benda yang digelapkan merupakan benda yang ada pada pelaku:

1. Karena keadaan terpaksa telah diserahkan kepadanya untuk disimpan.
2. Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.³⁷

Adami Chazawi memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan benda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak pada pasal tersebut, yaitu:³⁸

- a. Suatu keadaan terpaksa untuk dititipkan.

Keadaan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah suatu keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu.

Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena timbulnya sesuatu malapetaka.

³⁷ H.A.K Moch. Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung, hlm. 40.

³⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal.90.

Misalnya peristiwa seperti kebakaran, robohnya sebuah bangunan, perampokan, bencana tenggelamnya sebuah kapal, banjir, peristiwa yang tidak diduga sebelumnya akan terjadi.

b. Kedudukan sebagai seorang wali.

Dimaksudkan sebagai wali adalah seorang wali terhadap anak yang belum dewasa, yang pengangkatannya melalui suatu penetapan hakim. Dalam kedudukannya sebagai seorang wali, maka hubungannya dengan harta anak yang ada di bawah perwaliannya adalah berupa hubungan kekuasaan belaka. Apabila dalam kedudukannya yang demikian itu ia menggelapkan harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya, maka kedudukannya sebagai demikian mengakibatkan penggelapan yang dilakukan dengan pemberatan.

c. Kedudukan sebagai pengampu.

Seorang pengampu adalah seorang yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali bagi orang-orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap dalam lalu lintas hukum, misalnya karena penyakit jiwa.

Harta benda milik *curandus* yang berada dalam kekuasaan si pengampu itu karena kedudukannya

sebagai demikian ini, bila digelapkannya maka telah melanggar ketentuan Pasal 375.

d. Kedudukan sebagai seorang kuasa.

Kedudukan sebagai seorang kuasa disini adalah seorang kuasa yang ditunjuk oleh hakim, dan yang diberi kuasa untuk mengurus harta benda milik seseorang yang ditinggalkannya tanpa ia menunjuk seorang wakil untuk pengurusannya, dan juga terhadap harta benda yang terlantar yang tidak diketahui dengan jelas pemiliknya.

e. Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat

Setelah pewasiat meninggal dunia, maka apa yang dikehendaki pewasiat dalam surat wasiatnya itu dilaksanakan oleh wasi yang ditunjuknya dalam surat wasiat itu. Dalam kedudukannya sebagai wasi ini, apabila melakukan perbuatan memiliki terhadap harta benda itu, maka dipersalahkan melakukan penggelapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 375.

f. Kedudukan sebagai pengurus dari suatu lembaga sosial atau yayasan.

Suatu lembaga/badan sosial mempunyai orang-orang yang bertindak selaku pengurusnya. Dalam kedudukan sebagai pengurus inilah yang bersifat memberatkan.³⁹

³⁹ *Ibid.*

Pengertian dari *voogd* atau wali di dalam rumusan KUHP ialah orang yang dengan suatu penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa berikut harta kekayaan mereka.⁴⁰

Pengertian dari *curator* atau pengampu adalah orang yang dengan suatu penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang telah dewasa berikut harta kekayaan mereka, yakni karena mereka misalnya merupakan orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa, atau merupakan orang-orang yang dipandang tidak dapat mengurus harta kekayaan mereka sendiri, misalnya karena boros.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksana wasiat di dalam rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP ialah orang yang ditunjuk oleh orang lain di dalam wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki di dalam surat wasiat tersebut apabila ia kemudian meninggal dunia.⁴¹

⁴⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. cit*, hlm. 144

⁴¹ *Ibid.*

C. Perseroan Terbatas (PT)

1. Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007, UUPT tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham *Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen (IMA)* diundangkan dalam *Staatsblad* 1939 No. 569 jo 717.

2. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40 tahun 2007 pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau hutang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

3. Unsur- unsur perseroan terbatas

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT

Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain:

- a. Perjanjian antara dua orang atau lebih;
- b. Dibuat dengan akta otentik
- c. Modal dasar perseroan

d. Pengambilan saham saat perseroan didirikan

Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenanganya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), semua pemegang saham sebesar atau sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

4. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan. Meski pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan.

Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS.

Jika anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain misalnya Anggaran Dasar menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang.

Menurut Undang-undang, anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan di pengadilan untuk sengketa yang terjadi diantara Perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan.

Ketidakberwenangan mewakili itu juga berlaku apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam keadaan tersebut, yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi yang lainnya, atau jika seluruh anggota Direksi mempunyai perbenturan kepentingan maka kewenangan itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Karena pengelolaan Perseroan merupakan tanggung jawab Direksi, maka Direksi bertanggung jawab pula terhadap kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan *atau* kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi menanggung secara pribadi kerugian tersebut dalam hal Direksi terdiri dari 2 orang atau lebih maka tanggung jawab itu berlaku secara tanggung renteng. Anggota Direksi dapat terlepas dari tanggung jawab kerugian itu jika mereka dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, dan Direksi telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak mempunyai benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan pencegahan. Pemegang saham, atas nama Perseroan, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya itu menimbulkan kerugian Perseroan.

a. Kewajiban Direksi

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan Perseroan, Direksi wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. Selain dokumen-dokumen tersebut, Direksi juga berkewajiban membuat Laporan Tahunan Perseroan dan Dokumen Keuangan Perseroan, serta memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan itu.

Direksi wajib memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dokumen-dokumen itu atas permohonan tertulis. Dalam mengurus saham Perseroan, anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan keluarganya, untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Khusus.

Dalam mengurus harta kekayaan Perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan tersebut atau untuk menjadikannya jaminan hutang. Kekayaan Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPS itu adalah kekayaan Perseroan yang terdiri lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan – baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi itu adalah transaksi pengalihan kekayaan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku, atau bisa juga jangka waktu yang lebih lama asalkan diatur dalam Anggaran Dasarnya.

Persetujuan RUPS tidak diperlukan jika tindakan pengalihan atau penjaminan itu telah diatur dalam Anggaran Dasarnya. Tindakan Direksi dalam mengalihkan atau menjaminkan kekayaan Perseroan, meskipun dilakukan tanpa persetujuan RUPS dan tidak diatur dalam Anggaran Dasarnya, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum itu beritikad baik.

b. Pengangkatan Direksi

Orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Selain syarat umum tersebut, secara khusus undang-undang juga mengatur bahwa seseorang tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi jika dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya ia pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan pada saat pendirian, pengangkatan itu untuk pertama kalinya dilakukan oleh Pendiri Perseroan dan dicantumkan dalam akta pendiriannya. Pengangkatan itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali.

Anggaran dasar dapat mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, termasuk tata cara pencalonannya.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak menetapkannya, maka mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM – Departemen Hukum dan HAM. Pemberitahuan itu bertujuan agar perubahan anggota Direksi dicatat dalam Daftar Perseroan. Dengan pencatatan tersebut, maka calon anggota Direksi telah sah menjadi anggota Direksi, dan efektif dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Pemberitahuan itu dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Jika pemberitahuan itu belum dilakukan, Menteri akan menolak setiap permohonan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang baru – yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.

Segala ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut juga dapat dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu. Oleh karena itu pemidanaan harus memiliki tujuan dan fungsi yang mampu menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk menjamin dan mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.⁴²

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat para ahli hukum dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal dengan tiga aliran yaitu:⁴³

⁴² Muladi, *Op, Cit*, hlm. 149.

⁴³ Satochid Kartanegara, 2005, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal 56.

a. Absolute atau *vergeldings theorian* (*vergelde*/imbalan)

Teori ini mengajarkan dasar daripada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative* atau *doel theorian* (*doel*/maksud,tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan *vergelde*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pembedaan (*nut van de straf*).

c. *Verenigings theorian* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan daripada hukum.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*

Dari beberapa definisi di atas dapat kita ketahui:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa penjatuhan pidana hanya semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.⁴⁵

Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, dimana ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

⁴⁵ Muladi, *Op, Cit*, hlm. 19.

Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.⁴⁶

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

1. Teori menakut nakuti yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat.
2. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidanan akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 10.

husus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Sedangkan prevensi umum mengatakan bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dapat dipidana berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam prakteknya susah dilakukan.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghakiman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁴⁷

Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana,
- c. Perbaikan pribadi terpidana,
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 96.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 19.

3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan; dan
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu.

Keberadaan pidana tambahan adalah bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan akhir merupakan tahapan paling akhir dalam persidangan. Dalam putusan akhir ini nantinya hakim akan menjatuhkan vonis terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum menyusun putusannya. Pertama unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi semua sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwa oleh penuntut umum. Apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka hakim tidak bisa menjatuhkan vonis untuk menghukum terdakwa. Kedua tidak ada alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf adalah hal-hal yang menjadikan dapat dimaafkannya pelaku perbuatan pidana menurut hukum sehingga sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepadanya menjadi terhapus⁴⁹.

Misalnya daya paksa/*Overmacht* Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa/ *Noodweer* Pasal 49 ayat (1) KUHP, melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 KUHP, dan melaksanakan perintah jabatan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

⁴⁹ Abdul Kholiq, 2005, *Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, hlm. 144.

Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menjadikan dapat dibenarkannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga secara hukum sudah tidak merupakan perbuatan pidana lagi.⁵⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183 dijelaskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti kasus pidana dalam Pasal 184 KUHP dijelaskan tentang alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Secara teori dan berdasarkan UU No.4 tahun 2004 jo. UU No.5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal ada 3 jenis putusan majelis hakim sebagai berikut:

1. Putusan *unanimoust* adalah jika semua anggota majelis hakim setuju terhadap isi putusan, putusan ini juga sering disebut putusan bulat.
2. Putusan *concurring opinion* adalah jika semua anggota majelis hakim setuju dengan isi putusan secara bulat, tetapi ada sebagian anggota majelis yang memiliki alasan yang berbeda.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 145.

3. Putusan *dissenting opinion* adalah jika terhadap isi putusan yang ditetapkan oleh majelis, tetapi ada anggota majelis yang sebenarnya sama sekali berbeda pandangan dan putusan dengan majelis hakim secara keseluruhan.⁵¹

Meskipun dimungkinkan ada anggota majelis hakim yang mempunyai pertimbangan dan putusan berbeda pada saat membuat putusan akhir tetapi putusan hakim tersebut harus mendasarkan kepastian hukum semata. Meskipun idealnya putusan hakim harus memuat tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*).

⁵¹ Abdul Kholiq, *Struktur Badan Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta, 2010, hal 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan proposal skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian itu sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
2. Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjaring data yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi).
- b. Studi dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa.

D. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder.

Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan proposal ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perusahaan Swasta berdasarkan Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUGG

1. Posisi Kasus

Terdakwa dalam hal ini Adi Saputra Majid dalam kedudukannya sebagai Kepala Cabang PT. Niaga Abadi Subur Parigi Mountong yang bekerja pada Kantor PT. Niaga Abadi Subur diberi tugas untuk menerima pembayaran dari nasabah dan menerima permohonan peminjaman atau *repeat order* pengajuan peminjaman dari nasabah yang akan diteruskan ke PT. Niaga Abadi Subur dan untuk itu terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan. Atas kepercayaan dan tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepada terdakwa maka terdakwa telah meneruskan permohonan peminjaman atas nama nasabah Lily Tanjaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke kantor pusat PT. Niaga Abadi Subur yang kemudian disetujui oleh korban yang nilainya sesuai dengan pengajuan nasabah yang dikurangi dengan sisa angsuran peminjaman sebelumnya ditambah dengan angsuran pertama.

Oleh karena telah disetujui korban maka pada tanggal 10 Februari 2011 PT. Niaga Abadi Subur mengeluarkan dana yang kemudian ditransfer ke rekening milik terdakwa. Dana tersebut seharusnya disalurkan/diberikan seluruhnya kepada nasabah Lily Tanjaya akan tetapi terdakwa tidak menyalurkan/memberikan dana tersebut kepada nasabah

Lily tanjaya dan selain itu juga terdakwa telah menerima pembayaran dari nasabah Lily tanjaya yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin atau sepengetahuan korban.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair

Bahwa terdakwa Adi Saputra Majid dalam kedudukannya sebagai Kepala Cabang PT.Niaga Abadi Subur Parigi Mountong, pada sekitar bulan Februari sampai dengan November tahun 2011 yang bertempat di Kantor PT. Niaga Abadi Subur yang terletak di Jl. Mesjid Raya Limbung Nomor 33 Kecamatan Banjeng Kabupaten Gowa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Penguasaan terhadap suatu barang tersebut disebabkan adanya hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:

Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Niaga Abadi Subur Parigi Mountong yang bekerja pada Kantor PT. Niaga Abadi Subur yang pimpinan cabangnya adalah korban Hj. Mardiah Syam, S.Pd yang diberi tugas untuk menerima pembayaran dari nasabah dan menerima

permohonan peminjaman atau *repeat order* pengajuan peminjaman dari nasabah yang kemudian akan diteruskan ke PT. Niaga Abadi Subur dan untuk itu terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan. Atas kepercayaan dan tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepada terdakwa maka terdakwa telah meneruskan *repeat order* atas nama nasabah Lily Tanjaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke kantor pusat PT. Niaga Abadi Subur yang kemudian disetujui oleh korban yang nilainya sesuai dengan diajukan nasabah sehingga setelah dikurangi dengan sisa angsuran peminjaman sebelumnya ditambah dengan angsuran pertama yakni sebesar Rp. 19.037.000,- (sembilan belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka jumlahnya adalah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Oleh karena telah disetujui korban maka pada tanggal 10 Februari 2011 PT. Niaga Abadi Subur mengeluarkan dana sejumlah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kemudian ditransfer ke rekening milik terdakwa di bank BRI dengan nomor rekening 0363-01-004222-50-7 sejumlah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah yang seharusnya disalurkan/diberikan seluruhnya kepada nasabah Lily Tanjaya, akan tetapi terdakwa tidak menyalurkan/memberikan dana tersebut kepada nasabah dan terdakwa telah menerima pembayaran dari nasabah Lily Tanjaya sebesar Rp. 19.037.000,- (sembilan belas juta tiga puluh tujuh ribu

rupiah). Maka jumlah dana yang diterima oleh terdakwa keseluruhan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya meskipun tanpa seizin atau sepengetahuan korban.

Akibat perbuatan terdakwa maka korban Hj. Mardiah Syam S.Spd/PT. Niaga Abadi Subur mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Subsidiar:

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair diatas yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:

Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Niaga Abadi Subur Parigi Mountong yang bekerja pada Kantor PT. Niaga Abadi Subur yang pimpinan cabangnya adalah korban Hj. Mardiah Syam, S.Pd yang diberi tugas untuk menerima pembayaran dari nasabah dan menerima permohonan peminjaman atau *repeat order* pengajuan peminjaman dari

nasabah yang kemudian akan diteruskan ke PT. Niaga Abadi Subur dan untuk itu terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan. Atas kepercayaan dan tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepada terdakwa maka terdakwa telah meneruskan *repeat order* atas nama nasabah Lily Tanjaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke kantor pusat PT. Niaga Abadi Subur yang kemudian disetujui oleh korban yang nilainya sesuai dengan diajukan nasabah sehingga setelah dikurangi dengan sisa angsuran peminjaman sebelumnya ditambah dengan angsuran pertama yakni sebesar Rp. 19.037.000,- (sembilan belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka jumlahnya adalah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Oleh karena telah disetujui korban maka pada tanggal 10 Februari 2011 PT. Niaga Abadi Subur mengeluarkan dana sejumlah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kemudian ditransfer ke rekening milik terdakwa di bank BRI dengan nomor rekening 0363-01-004222-50-7 sejumlah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah yang seharusnya disalurkan/diberikan seluruhnya kepada nasabah Lily Tanjaya, akan tetapi terdakwa tidak menyalurkan/memberikan dana tersebut kepada nasabah dan terdakwa telah menerima pembayaran dari nasabah Lily Tanjaya sebesar Rp. 19.037.000,- (sembilan belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Maka jumlah dana yang diterima oleh terdakwa keseluruhan

berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya meskipun tanpa seizin atau sepengetahuan korban.

Akibat perbuatan terdakwa maka korban Hj. Mardiah Syam S.Spd/PT. Niaga Abadi Subur mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Terdakwa telah ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013.
- Penuntut umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013.

Pengadilan Negeri tersebut telah:

- Membaca berkas perkara.
- Mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.
- Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Saputra Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penggelapan karena jabatannya yang dipandang berdiri sendiri-sendiri “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI pertanggal 16 Februari 2011 dari penyetor/depositor atas nama Nas / Haf ke rekening 0363-01-004222-50-7 atas nama Adi Saputra Majid sejumlah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Adi Saputra Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan”.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karenaitu dengan pidana penjara selama sepuluh bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI pertanggal 16 Februari 2011 dari penyetor/depositor atas nama Nas / Haf ke rekening 0363-01-004222-50-7 atas nama Adi Saputra Majid sejumlah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan pula biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu, primair : didakwa dengan Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua, subsidair: dengan Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhinya diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan pertama tidak memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum didalam dakwaannya telah benar dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu dengan melihat penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena upah untuk itu.

Sehingga terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Dengan Sengaja”
2. Unsur “Suatu Benda”
3. Unsur “Barangsiapa”

Barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan. Dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa Adi Saputra Majid. Maka dari itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

4. Unsur “Menguasai Secara Melawan Hukum”

Maksud dari menguasai secara melawan hukum yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Terdakwa mempergunakan sendiri dana yang seharusnya diserahkan kepada nasabah untuk kepentingan pribadinya meskipun tanpa seizin atau sepengetahuan korban.

5. Unsur “Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”

6. Unsur “ Berada Padanya bukan Karena Kejahatan”

Kata-kata berada padanya itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu.

7. Unsur “ Berada dalam Kekuasaannya karena hubungan kerja atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Terdakwa yang bekerja selaku Kepala Cabang PT. Niaga Abadi Subur Parigi Moutong yang bekerja pada Kantor PT. Niaga Abadi Subur, dan diberi gaji sebesar Rp. 1.050.00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUGG.

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUGG

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja dalam membuat keputusan, Hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, kecermatan, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk

perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu melanggar ketentuan sebagai berikut:

Primair: Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidaire: Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut diatas dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya tersebut.

Menimbang, bahwa olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa barangsiapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Adi Saputra Majid diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannyabukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan unsur ini harus terpenuhi maksud ketentuan “dengan sengaja” yang menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang disadari dan ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja sama dengan menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang diakui pula oleh terdakwa bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2011 PT. Niaga Abadi Subur mengeluarkan dana sejumlah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kemudian ditransfer kerekening milik terdakwa di bank BRI dengan nomor rekening 0363-01-004222-50-7 sejumlah Rp. 40.963.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seharusnya disalurkan/diberikan seluruhnya kepada nasabah Lily Tanjaya, akan tetapi terdakwa tidak menyalurkan/memberikan dana tersebut kepada nasabah dan terdakwa telah menerima pembayaran dari nasabah Lily Tanjaya sebesar Rp. 19.037.000,- (sembilan belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Maka jumlah dana yang diterima oleh terdakwa keseluruhan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya meskipun tanpa seizin atau sepengetahuan korban, sehingga PT. Niaga Abadi Subur mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut sebagai tujuan yang dimaksudkan terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Niaga Subur Moutong yang diberi tugas oleh kantor pusat PT. Niaga Abadi Subur yang terletak di Jl. Mesjid Raya Limbung Nomor 33 Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk menerima pembayaran dari nasabah dan menerima permohonan peminjaman dari nasabah yang kemudian akan diteruskan ke PT. Niaga Abadi Subur, dan setiap bulannya terdakwa menerima gaji dari PT. Niaga Abadi Subur sebesar RP. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Kepala Cabang PT. Niaga Abadi Subur Moutong sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka waktu selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain dalam hal ini PT. Niaga Abadi Subur.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada PT. Niaga Abadi Subur sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Memperhatikan pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian dua alat bukti tersebut oleh hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUGG, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karena unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Adi Saputra Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan".

Dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUGG, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti berupa satu lembar bukti transfer yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima dana yang seharusnya diserahkan kepada nasabah. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain dan terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah melakukan wawancara dengan Hakim yang memutus kasus ini yaitu Yoga

Dwi Ariastomo Nugroho, SH,MH, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengembalian sejumlah uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUGG telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Subsidiar: Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Diantara unsur-unsur kedua pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam perusahaan swasta dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga membuat terdakwa Adi Saputra Majid patut dijatuhi hukuman/dipidana.

Selain itu kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan hal-hal pada diri terdakwa dan atau perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan agar dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.

B. Saran

1. Penerapan sanksi terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kerugian-kerugian yang didapatkan oleh korban baik dari segi materil dan inmateril harus dipertanggungjawabkan. Agar dikemudian hari pelaku kejahatan memiliki efek jera agar tidak mengulangnya lagi.
2. Hakim memang memiliki tugas yang sangat berat karena keputusan berada sepenuhnya di tangan Hakim. Jadi seorang Hakim dalam memutus perkara harus menjatuhkan putusan seobyektif mungkin agar masing-masing pihak tidak merasakan

ketidakadilan yang mengacu pada kurangnya kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- _____, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2003. *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. 2011, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Sinar Grafika.
- H.A.K Moch. Anwar. 1980, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni Bandung.
- Made Widnyana, 2010, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang dan Samosir, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Sinar Baru
- Leden Marpaung. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- M. Sudrajat Bassar. 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP*. Bandung: Remaja Karya.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- _____. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Satochid Kartanegara, 2005 *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.